

## **<sup>1</sup>IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN**

Putra Aditiya<sup>1</sup>, Kustiawan<sup>2</sup>, Nazaki<sup>3</sup>  
Padit4836@gmail.com

Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

### ***ABSTRACT***

The Bintan Regency Government in 2019 has issued the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT). The BPNT program is the government's effort to transform the basic food assistance program into non-cash, namely through the use of electronic cards that are given directly to Beneficiary Families (KPM). In this program, it is hoped that it will reduce the burden on poor households and in the future it is hoped that it will be able to break the chain of poverty between generations. In this case, the researcher uses a qualitative descriptive research method. Primary data were obtained by means of interviews and observations, and secondary data were taken from written reports and publications. And the results of this study indicate that the implementation of the distribution of the BPNT program still needs to be improved. It can be seen from (1) the size and policy, in this case consisting of the right price and right target. For the right price, the community receives Rp. 200,000 per month and for the right target, it still needs to be improved because the results of interviews and observations show that there are still poor people who do not receive assistance. (2) resources, for this matter it has been going quite well because of the quality of human resources. (3) the characteristics of the implementing agent, in the implementation process it has gone quite well and can be seen from the satisfaction of the community. (4) the attitude of the implementers, overall it has been going well, although there are still things that need to be improved again, which can be seen from the satisfaction of the community. (5) communication between organizations, has been going well, although it needs more approach to the community. (6) the economic, social and political environment is good, it can be seen from the response of community groups.

Keywords: Implementation, Public Policy, BPNT

### **I. Pendahuluan**

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang ada di berbagai negara termasuk Indonesia. Banyaknya faktor penyebab terjadinya kemiskinan, dari lajunya pertumbuhan penduduk, angka pengangguran tinggi, tingkat Pendidikan rendah, distribusi yang tidak merata dan lainnya. Menurut Syaiful Arif (2000: 289), mengatakan bahwa kemiskinan terbagi dalam dua kategori yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural dimaknai sebagai akibat dari adanya karakter budaya dan etos kerja masyarakat yang lemah, sementara

kemiskinan struktural dipandang sebagai akibat dari terjadinya ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang timpang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, pada September 2019 penduduk miskin tercatat 24,79 juta orang. Angka tersebut turun 0,36 juta orang terhadap maret 2019 dan menurun 0,88 juta orang terhadap September 2018. Walaupun demikian, secara total kemiskinan di Indonesia turun, tapi ada permasalahan tiinginya perbedaan antara perkotaan dan perdesaan masih tinggi.

Di negara Indonesia segala sesuatu telah diatur oleh Undang-undang, bahkan undang-undang kemiskinan telah dikeluarkan guna mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Persentase kemiskinan di Kota pada September 2019 tercatat 6,56 persen, sedangkan persentase kemiskinan di perdesaan mencapai 12,60 persen. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memberantas kemiskinan yang terjadi di Indonesia dengan mengeluarkan program-program sosial. Beberapa kebijakan dan program yang dilaksanakan pemerintah guna menanggulangi masalah kemiskinan, seperti bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan kebijakan program lain dalam tujuan meningkatkan kegiatan ekonomi. Untuk itu dalam rangka penanggulangan kemiskinan pemerintah memuat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Program BPNT di tetapkan oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (PERMENSOS RI) No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. BPNT adalah bantuan pangan yang di salurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang hanya digunakan untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara). Tujuan dari program ini ialah untuk meningkatkan ketetapan kelompok sasaran, memberikan gizi yang lebih seimbang dan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha enceran rakyat, memerikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin, dan mengefektifkan anggaran. Dalam jangka Panjang, bantuan pangan secara nontunai diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat.

Program BPNT mulai dilaksanakan dan di salurkan pada tahun 2017 di 44 Kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan akan diperluas di seluruh Kota dan Kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai. Mulai tahun 2018 bantuan pangan akan di salurkan ke masing-masing Kabupaten/Kota dalam bentuk non tunai atau natura, yaitu tetap dalam bentuk beras dan telur. Para keluarga yang menerima manfaat BPNT adalah keluarga yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BPNT. KPM adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp. 200.000,-/KPM/bulan. Apabila jika bantuan tidak di belanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan akan hangus dalam akun elektronik Bantuan Pangan.

Tujuan program BPNT adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM
3. Meningkatkan ketetapan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi
4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi pangan

Manfaat progrrdam BPNT sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan
2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

**Tabel 1.** Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan Bintang Timur

No.	Kelurahan	Jumlah
1.	Kelurahan Kijang Kota	703
2.	Kelurahan Gunung Lengkuas	142
3.	Kelurahan Sei Nam	56
4.	Kelurahan Sei Lekop	150
	<b>Total</b>	<b>1.051</b>

Sumber : Kecamatan Bintang Timur

Berdasarkan jumlah penduduk miskin di Kecamatan Bintang Timur yang terdiri dari empat Kelurahan secara keseluruhan memiliki 1.051 jumlah penduduk miskin. Untuk Kelurahan Kijang Kota sendiri memiliki jumlah 703 untuk penduduk miskin, Kelurahan Gunung Lengkuas 142 penduduk miskin, Kelurahan Sei Nam 56 penduduk miskin, dan Kelurahan Sei lekop 150 penduduk miskin

**Tabel 2.** Penerimaan Program BPNT di Kecamatan Bintang Timur , 2020

No.	Kelurahan	Jumlah
1.	Kelurahan Kijang Kota	536
2.	Kelurahan Gunung Lengkuas	142
3.	Kelurahan Sei Nam	56
4.	Kelurahan Sei Lekop	133
	<b>Total</b>	<b>867</b>

Sumber : Kecamatan Bintang Timur

Berdasarkan jumlah penduduk miskin yang menerima bantuan non tunai di Kecamatan Bintang Timur yang terdiri dari empat Kelurahan secara keseluruhan memiliki 867 jumlah penduduk miskin. Untuk Kelurahan Kijang Kota sendiri memiliki jumlah 536 untuk penduduk miskin, Kelurahan Gunung Lengkuas 14 penduduk miskin, Kelurahan Sei Nam 56 penduduk miskin, dan Kelurahan Sei lekop 133 penduduk miskin. Berdasarkan data diatas, dapat dilihat jika kemiskinan yang ada di wilayah Kecamatan Bintang Timur masih banyak dan jika melihat jumlah yang menerima bantuan program Bantuan Pangan Non Tunai tersebut masih banyak masyarakat yang tidak menerima bantuan tersebut. dengan kata lain pengimplementasian program Bantuan Non tunai belum optimal.

Penelitian ini menggunakan Teori Proses Implementasi Donald S. Van Metter dan Carl E Van Horn yang disebut dengan “ *A Model of Policy Implementatiton*”. Model ini mengatakan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik , pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Peneliti menggunakan teori ini karena sangat relevan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dalam proses implementasi model ini terdapat beberapa variabel yang dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, diantaranya adalah

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksanaan
6. Lingkungan sosial , ekonomi dan politik.

## II. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dimana menurut Moeleong (2010: 4) metode kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atas perilaku yang dapat diamati. Menurut Sugiyono (2014: 9) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengambilan data adalah Teknik yang mengacu pada metode penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Yaitu observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, wawancara, dapat dilakukan dengan tatap muka ataupun dengan telepon. Deokumentasi, melalui media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 3.** Informan yang diwawancarai

No	Informan	Jumlah Orang
1.	Tim Koordinator Lapangan (Dinas Sosial)	1 orang
2.	Pihak Kecamatan Bintan Timur	1 orang
3.	Pemilik E Warung	3 orang
4	Masyarakat	4 orang

*Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2021*

## III. Hasil dan Pembahasan

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi akan baru dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan. Program kegiatan telah tersusun dan dana sudah tersedia, dan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, dengan menggunakan teori Van Metter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan public antara lain :

### 1. Tujuan dan Kebijakan

Ukuran dan kebijakan ini sangat berpengaruh dalam menganalisis implementasi kebijakan. indikator-indikator kebijakan ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan sejauh mana kebijakan ini telah direalisasikan. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan berguna dalam

menguraikan tujuan secara menyeluruh. Untuk kebijakan ini, indikator yang dapat dilihat yakni Tepat Harga, dan Tepat Sasaran.

Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan yang telah dilakukan pemerintah Kecamatan Bintang Timur tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai, mengenai pengimplementasiannya belum optimal. Walaupun dalam tepat harga, masyarakat sudah cukup puas dengan yang ditentukan pemerintah, tetapi untuk tepat sasaran, masih belumnya semua masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan tersebut.

## 2. Karakteristik Agen Pelaksana

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu juga memiliki peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk sumber daya manusia yang dimiliki dalam kebijakan ini sudah bagus, karena memiliki kapasitas yang sesuai.

Dan juga selain sumberdaya manusia, ada juga sumberdaya finansial yang perlu diperhatikan, karena mau tidak mau Ketika sumberdaya manusia yang berkompeten tidak tersedia, maka akan terjadi persoalan untuk merealisasikan sesuatu yang menjadi tujuan kebijakan publik. dikatakan mengenai sumber daya finansial tidak memiliki kendala sehingga dapat memperkecil terjadinya kegagalan. Dan yang terakhir Sumberdaya Waktu. Demikian pula dengan hal nya sumberdaya waktu, sumber daya manusia giat bekerja dan aliran dana anggaran berjalan dengan baik, tetapi terhambat oleh persoalan waktu. Maka hal ini dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

sumberdaya waktu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Tentu saja hal ini terus dilakukan hingga sekarang. Dan dari hasil dari observasi peneliti, saat menanyakan beberapa e-warung tentang bagaimana koordinator lapangan bekerja? Jawaban dari pemilik e-warung mengatakan hal yang sama, bahwa koordinator lapangan sudah cukup baik, selalu turun lapangan setidaknya sebulan sekali atau saat anggaran sudah cair dan/ saat akan penerima KPM melakukan kegiatan menukarkan anggaran tersebut menjadi bahan pokok untuk sebulan.

## 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana tidak lepas dari struktur birokrasi yang dapat diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang. Aspek yang diteliti lebih lanjut dari karakteristik organisasi pelaksana adalah *Standar Operating Procedure* (SOP) Bantuan Pangan Non Tunai. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit, dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, Panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Berdasarkan hasil yang didapat dari Staf Dinas Sosial, terdapat beberapa tahap yang harus memenuhi prinsip :

1. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis jumlah dan kualitas bahan pangan serta e-warung
2. KPM dapat memanfaatkan dana bantuan program sembako pada e-warung tersebut

3. E-warong tidak menargetkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh e-warong atau pilah lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan
4. E-warong dapat membeli pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM
5. Bank penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan
6. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM
7. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM
8. Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan program sembako sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku.

Dari hasil wawancara kepada salah satu KPM bahwa masih terdapat beberapa kendala yang terjadi. Kesalahan kecil yang terjadi dapat mengakibatkan terhambatnya implementasi kebijakan karena dapat mempengaruhi tujuan kebijakan yang telah direncanakan.

#### **4. Sikap Para Pelaksana**

Sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan. Karena itu pelaksanaan kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang ditetapkan. Maksimal atau tidaknya sebuah kebijakan implementasi itu juga ditentukan oleh sikap pelaksana dan pemerintah setempat, adanya sebuah dukungan yang diberikan oleh pemerintah ataupun tingkat kemauan yang tinggi yang dimiliki oleh pihak pelaksana itu akan membantu memaksimalkan proses berjalannya sebuah implementasi.

Sikap dan arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan merupakan hal yang krusial. Implementor mungkin bisa menjadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi suatu kebijakan. Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap suatu keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya intensitas disposisi para pelaksana dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Para pelaksana akan sulit jika tidak memahami betul apa yang menjadi dasar Tindakan mereka, atau dapat dikatakan dengan kata lain bahwa kelompok manusia akan menemukan kesulitan untuk melaksanakan Tindakan secara efektif karena mereka tidak mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang mendasari Tindakan tersebut. bila hal ini terjadi, maka proses implementasi akan menimbulkan perdebatan, bawahan mungkin akan menolak untuk berperan serta dalam suatu kebijakan. Sikap para pelaksana, dalam sikap para pelaksana secara keseluruhan sudah dijalankan dengan baik, akan tetapi perlu adanya perbaikan lagi, karena hasil dari observasi masih banyaknya masyarakat yang kurang puas.

#### **5. Komunikasi Antar Organisasi**

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. Implementasi akan berjalan secara efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memperhatikan kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan, ketetapan komunikasinya

dengan para pelaksana dan konsistensi atau kesegaraman dari ukuran dasar dan tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai komunikasi.

Menurut Van metter dan Van Horn dalam Agustino (2014; 144) prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran dan tujuan yang dinyatakan oleh ketetapan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan tersebut. semakin baik koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi

Berikut sasaran edukasi dan sosialisasi program sembako adalah :

1. K/L terkait
2. Pemerintah daerah, termasuk tim koordinasi penanggulangan kemiskina dan tim koordinator bansos pangan Provinsi, kabupaten/Kota dan kecamatan
3. Perangkat desa/ aparatur kelurahan dan jajaran di bawahnya
4. Tenaga pelaksana bansos pangan
5. KPM
6. Pemilik/ pengelola e-warong
7. Bank penyalur baik di tingkat pusat maupun cabang
8. Masyarakat umum

Berikut materi edukasi dan sosialisasi program sembako setidaknya mencakup :

1. Kebijakan dan tujuan sembako
2. Prinsip pelaksanaan program sembako
3. Mekanisme pelaksanaan program sembako, termasuk penerapan protokol Kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19
4. Produk dan tata cara penggunaan KKS
5. Tata pengaduan
6. Pentingnya pemenuhangizi pada 1000 hari pertama kehidupan untuk mencegah stunting melalui pemabfaatan bantuan program sembako
7. Pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dalam pelaksanaan Gerakan nasional non tunai

Implementasi yang berhasil sering kali membutuhkan mekanisme dan prosedur lembaga. Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat-pejabat tinggi untuk mendorong pelaksana bertindak dalam satu cara yang konsistendengan ukuran dasar dan tujuan kebijakan. Komunikasi antar organisasi, secara keseluruhan komunikasi antar organisasi sudah cukup bagus, akan tetapi perlu pendekatan lebih baik lagi ke masyarakat.

## **6. Lingkungan Enonomi, Sosial dan Politik**

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementas kebijakan.

Kondisi ekonomi, sosial dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Secara lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Jika dilihat dari segi sosial masyarakat mereka sangat merespon adanya program BPNT, mereka sangat mendukung adanya program tersebut.

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu untuk mengupayakan implementasi kebijakan

harus juga memperhatikan kondisi lingkungan eksternal. Dalam hal ini, lingkungan sosial ekonomi dan politik yang diteliti lebih lanjut adalah perilaku masyarakat yang bukan dari kelompok sasaran kebijakan program BPNT.

Dari pernyataan Ibu Juli dan Ibu Riemi sebagai pemilik e-warong, beberapa kelompok masyarakat yang bukan kelompok sasaran kebijakan, berikut tanggapan yang di peroleh :

1. Mereka mengetahui program bantuan non tunai yang di jalankan pemerintah dan merespon dengan cukup baik
2. Beberapa kelompok masyarakat yang bukan merupakan penerima bantuan, merespon cukup baik yang ditunjukkan dengan membantu dalam proses penerimaan bantuan berlangsung
3. Alasan kelompok masyarakat merespon dengan baik dikarenakan dengan adanya bantuan tersebut akan berdampak baik pada lingkungan di sekitaran mereka.

Dari hasil yang dapat disimpulkan Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, dalam hal ini dapat mempengaruhi jalannya suatu kebijakan. Karena keadaan ekonomi, sosial, dan politik dapat mendukung bahkan sebaliknya. Di Kecamatan Bintan Timur sendiri keadaan sosialnya masih dikatakan sudah baik, untuk keadaan ekonomi walaupun sudah cukup baik tetapi masih banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan, dan untuk politik sudah cukup baik.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan skripsi ini, sebagaimana yang telah di jabarkan dan dijelaskan mengenai Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara ukuran dan tujuan kebijakan, dalam hal ini sudah cukup baik walaupun masih perlu adanya perbaikan yang dilakukan. Terdapat 2 indikator dalam hal ini yaitu tepat harga dan tepat sasaran. Untuk tepat harga dari hasil wawancara dan observasi masyarakat sudah puas dan untuk tepat sasaran menurut hasil wawancara dan observasi masih adanya kekurangan yaitu masih adanya masyarakat miskin yang tidak mendapat bantuan.
2. Sumber daya, untuk sumber daya sendiri hasil dari peneliti yang mewawancarai dari pihak pemerintah maupun swasta sudah cukup baik dan hasil observasi sudah baik.
3. Karakteristik agen pelaksana, karakteristik pelaksana dalam proses implementasi BPNT belum optimal perlu adanya perbaikan..
4. Sikap para pelaksana, dalam sikap para pelaksana secara keseluruhan sudah dijalankan dengan baik, akan tetapi perlu adanya perbaikan lagi, karena hasil dari observasi masih banyaknya masyarakat yang kurang puas.
5. Komunikasi antar organisasi, secara keseluruhan komunikasi antar organisasi sudah cukup bagus, akan tetapi perlu pendekatan lebih baik lagi ke masyarakat, karena masyarakat dan pemilik e warong, karena tidak semuanya bisa mengerti apa yang pihak pemerintah atau penyelenggara sampaikan
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, dalam hal ini dapat mempengaruhi jalannya suatu kebijakan. Karena keadaan ekonomi, sosial, dan politik dapat mendukung bahkan sebaliknya. Di Kecamatan Bintan Timur sendiri keadaan sosialnya masih dikatakan sudah baik, untuk keadaan ekonomi walaupun sudah cukup baik tetapi masih banyak ,asyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan, dan untuk politik sudah cukup baik.

## V. Daftar Pustaka

### Buku

- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung
- Moeleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Arif, S. (2000). *Menolak Pembangunanisme*. Pustaka Pelajar.

### Jurnal/Skripsi

- Anisa Rahma Dini. (2018). "Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Belitung Utara Kota Bandar Lampung" Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.
- Ika Surya Kharismawati dan Weni Rosdiana. (2018). "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui E-Warong di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya" Jurusan Administrasi Publik, Universitas Negeri Surabaya.
- Ristiana Pramesti. (2019). "Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui Elektronik Gotong Royong di Kota Tanjungpinang" Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas *Maritim* Raja Ali Haji.

### Dokumen

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Pangan Non Tunai
- Kecamatan Bintan Timur Dalam Angka Tahun 2018-2020
- Pedoman Umum Program Sembako